

**RINGKASAN
DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

I. PENDAHULUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut klasifikasi Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan serta belanja menurut kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Penyusunan PPAS Kabupaten Madiun tahun 2018 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Dokumen PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah (PD) terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan.

II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara keseluruhan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 yang meliputi proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara terinci disampaikan oleh tabel berikut :

Proyeksi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	R-APBD 2018
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.813.416.063.919,92
1.1	Pendapatan Asli Daerah	190.497.937.259,92
1.1.1	Pajak Daerah	51.243.461.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	34.799.239.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.669.955.260,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	98.785.282.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.252.220.623.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	68.486.049.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	877.868.685.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	305.865.889.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.813.416.063.919,92
2	BELANJA DAERAH	1.839.427.522.279,92
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.158.782.363.911,92
2.1.1	Belanja Pegawai	802.295.844.182,00
2.1.2	Belanja Subsidi	515.000.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	67.122.733.560,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.815.000.000,00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prop/ Kab/ Kota dan Pem Desa	4.381.600.940,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/ Kab/ Kota dan Pem	280.652.185.230,00

NO	URAIAN	R-APBD 2018
1	2	3
	Desa	
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	680.645.158.368,00
2.2.1	Belanja Pegawai	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-
2.2.3	Belanja Modal	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.839.427.522.279,92
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.011.458.360,00)
2	PEMBIAYAAN DAERAH	26.011.458.360,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.011.458.360,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.190.297.000,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	500.000.000,00
3.1.3	Penerimaan Dana Cadangan	30.321.161.360,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.011.458.360,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.500.000.000,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun untuk tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Keamanan
6. Lingkungan Hidup
7. Pariwisata

Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan atau mencapai sasaran target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah, sebagaimana tabel dibawah :

Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Pertanian	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan	a. Dinas Pertanian dan Perikanan b. Dinas Ketahanan Pangan	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2	Pendidikan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun b. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan c. Program Pendidikan Non Formal d. Program Pendidikan Anak Usia Dini

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
3.	Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Dinas Kesehatan b. RSUD Caruban c. RSUD Dolopo	a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat e. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat g. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru
4	Ketenagakerjaan	Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5	Keamanan	Meningkatnya kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat serta wawasan kebangsaan dan politik daerah serta meningkatnya ketertiban, keamanan dan ketentraman	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri b. Satuan Polisi Pamong Praja	a. Program Pendidikan Politik Masyarakat b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan c. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal d. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
6	Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup	a. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7	Pariwisata	Meningkatnya potensi kepariwisataan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Penetapan prioritas dilakukan tidak hanya mencakup keputusan yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan setelah penetapan prioritas program dan plafon anggaran.

Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun Anggaran 2018

NO.	SKPD	PLAFON
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.995.347.492
2	Dinas Kesehatan	76.597.084.977
3	RSUD Caruban	67.510.719.000
4	RSUD Dolopo	32.353.828.900
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	191.266.159.359
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.076.700.000
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.425.686.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.515.839.900
9	Dinas Sosial	2.153.935.000

NO.	SKPD	PLAFON
1	2	3
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.105.402.500
11	Dinas Tenaga Kerja	1.857.133.500
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.892.312.000
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.309.974.100
14	Dinas Lingkungan Hidup	18.383.808.450
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.830.515.000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.706.171.600
17	Dinas Perhubungan	19.951.641.300
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.825.455.000
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	10.881.266.990
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.569.197.700
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	10.595.850.000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.515.000.000
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.853.268.200
24	Bagian Administrasi Pemerintahan	1.093.872.800
25	Bagian Hukum	1.666.000.000
26	Bagian Administrasi Pembangunan	652.500.000
27	Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang	8.069.000.000

NO.	SKPD	PLAFON
1	2	3
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.222.800.000
29	Bagian Perekonomian	1.432.800.000
30	Bagian Umum	9.433.500.000
31	Bagian Organisasi	1.130.250.000
32	Bagian Humas dan Protokol	582.600.000
33	Sekretariat DPRD	17.248.450.000
34	Kecamatan Balerejo	412.639.000
35	Kecamatan Dagangan	456.400.500
36	Kecamatan Dolopo	1.613.500.000
37	Kecamatan Geger	392.580.000
38	Kecamatan Gemarang	415.400.000
39	Kecamatan Jiwan	395.950.000
40	Kecamatan Kebonsari	442.474.000
41	Kecamatan Kare	402.937.000
42	Kecamatan Madiun	972.399.000
43	Kecamatan Mejayan	1.759.440.000
44	Kecamatan Pilangkenceng	415.667.000
45	Kecamatan Sawahan	429.177.000

NO.	SKPD	PLAFON
1	2	3
46	Kecamatan Saradan	465.113.000
47	Kecamatan Wungu	2.131.608.500
48	Kecamatan Wonoasri	388.177.000
49	Inspektorat	2.474.560.000
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.300.000.000
51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.711.635.122
52	Badan Pendapatan Daerah	4.947.159.200
53	Badan Kepegawaian Daerah	4.521.495.000
TOTAL		680.645.158.368

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang dimaksud dengan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); dan penerimaan kembali investasi Dana Bergulir. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2018

NO.	U R A I A N	APBD TAHUN 2017 (Rp)	APBD TAHUN 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30,461,241,442.00	33,011,458,360.00	8.37
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	29,961,241,442	2,190,297,000.00	(92.69)
	b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	500,000,000	500,000,000	-
	c. Penerimaan Dana Cadangan	-	30,321,161,360	3,032.12
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,500,000,000.00	7,000,000,000.00	(55.56)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,500,000,000	7,000,000,000.00	250
	PEMBIAYAAN NETTO	25,961,241,442.00	26,011,458,360.00	(0.19)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-